

**KOMPETENSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN DUKUNGAN
LINGKUNGAN SOSIAL INKLUSIF DALAM REINTEGRASI SOSIAL ANAK
PELAKU: STUDI DI BAPAS KELAS I SEMARANG**

Arlingga Abintana Budi Satria¹, Umar Anwar², Iman Santoso³

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

arlinggaabintana@gmail.com, umaranwar@poltekip.ac.id, imsato1979@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the competence of correctional guidance officers and the support of an inclusive social environment in the social reintegration of children who have committed an offence at the Class I Probation and Correctional Center of Semarang. A descriptive qualitative approach was employed using a holistic single-case design. Primary data were obtained through semi-structured interviews with one correctional guidance officer, one child client, and one community representative, complemented by participatory observation and document review. The findings show that correctional guidance officer competence is multidimensional. It includes child-sensitive communication, social assessment, understanding of child development and trauma, individualized guidance, networking, coordination, and multidimensional evaluation. An inclusive social environment is reflected in emotional and practical family support, opportunities to participate in education, training, social activities, and employment, as well as the involvement of community groups concerned with correctional services. However, stigma, family conflict, limited community participation, and the workload ratio between officers and clients remain significant obstacles. Social reintegration is therefore not merely indicated by the absence of reoffending, but also by behavioral change, healthy family relations, access to productive activities, social acceptance, and realistic future planning. The study concludes that correctional guidance officers and the social environment function interdependently: officers open access and coordinate interventions, while families and communities provide the social space in which children can practice and sustain behavioral change.

Keywords: *correctional guidance officer competence, inclusive social environment, child offender, social reintegration, probation and correctional center*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan dukungan lingkungan sosial inklusif dalam proses reintegrasi sosial anak pelaku di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal holistik. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan satu PK, satu klien anak, dan satu perwakilan masyarakat, serta dilengkapi observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi PK bersifat multidimensional, meliputi komunikasi yang berperspektif anak, asesmen dan analisis sosial, pemahaman terhadap perkembangan psikologis serta trauma anak, penyusunan bimbingan individual, pembangunan jejaring, koordinasi, dan evaluasi perkembangan secara multidimensional. Lingkungan sosial inklusif tercermin dari

dukungan emosional dan praktis keluarga, kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan, kegiatan sosial, dan pekerjaan, serta keterlibatan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Hambatan yang ditemukan meliputi stigma, konflik keluarga, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan beban kerja PK yang membatasi intensitas bimbingan. Reintegrasi sosial tidak cukup diukur dari tidak terjadinya pengulangan tindak pidana, tetapi juga dari perubahan perilaku, relasi keluarga yang lebih sehat, akses terhadap kegiatan produktif, penerimaan sosial, dan rencana masa depan yang realistis. Penelitian menyimpulkan bahwa PK dan lingkungan sosial bekerja secara saling bergantung: PK membuka akses serta mengoordinasikan intervensi, sedangkan keluarga dan masyarakat menyediakan ruang sosial bagi anak untuk mempraktikkan dan mempertahankan perubahan perilaku.

Kata Kunci: kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, lingkungan sosial inklusif, anak pelaku, reintegrasi sosial, Bapas

A. Pendahuluan

Perubahan paradigma pemasyarakatan di Indonesia menempatkan reintegrasi sosial sebagai salah satu orientasi penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan diarahkan pada pembinaan, pembimbingan, perlindungan, pemenuhan hak, serta reintegrasi warga binaan dan klien ke dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks anak pelaku, reintegrasi tidak dapat dipahami sebagai pemulangan anak semata, melainkan sebagai proses bertahap untuk memulihkan relasi sosial, mengembangkan tanggung jawab, dan memastikan anak memperoleh kesempatan tumbuh

dalam lingkungan yang aman serta mendukung.

Proses reintegrasi anak pelaku berlangsung dalam ekosistem sosial yang kompleks. Anak berinteraksi dengan PK, keluarga, sekolah, teman sebaya, masyarakat, dan lembaga pendukung. Setiap lingkungan dapat menjadi faktor pelindung sekaligus faktor risiko. Keluarga dapat menjadi sumber dukungan, tetapi juga dapat menjadi sumber tekanan apabila komunikasi tidak sehat atau kesalahan masa lalu terus diungkit. Masyarakat dapat menyediakan kesempatan berpartisipasi, tetapi stigma dan kecurigaan dapat membatasi akses anak terhadap pendidikan, pekerjaan, kegiatan sosial, dan relasi yang sehat.

Dalam ekosistem tersebut, PK menempati posisi strategis karena berperan sebagai pendamping, asesor,

pengawas, mediator, dan penghubung antara anak dengan berbagai sumber daya sosial. Kompetensi PK tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menyelesaikan administrasi atau menyusun Penelitian Kemasyarakatan (*litmas*). Kompetensi juga mencakup kemampuan membangun hubungan kepercayaan, memahami perkembangan psikologis anak, membaca faktor risiko dan faktor pelindung, menyusun bimbingan yang responsif, serta mengoordinasikan keluarga, sekolah, Pokmas Lipas, dan pihak profesional.

Penelitian terdahulu telah mengkaji reintegrasi sosial dari berbagai sudut. Sasmita, Kriswanto, dan Jhody (2024) menunjukkan pentingnya peran Bapas Semarang dalam menjalankan tahapan

reintegrasi, sekaligus mengidentifikasi persoalan beban kerja PK dan konsistensi klien dalam mengikuti bimbingan. Tahamata (2021) menyoroti tantangan pengawasan klien, termasuk keterbatasan sumber daya petugas dan perlunya pelibatan masyarakat. Saputra (2021) menempatkan PK sebagai motivator, konselor, dan pengawas yang membutuhkan komunikasi empatik serta pemahaman psikologis. Sementara itu, Azkiy (2024) memperlihatkan bahwa dukungan sosial dan kemampuan menghadapi stigma berpengaruh terhadap pemulihan keberfungsian sosial mantan narapidana.

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan

Peneliti	Fokus dan metode	Temuan utama	Relevansi dengan artikel
Sasmita, Kriswanto, dan Jhody (2024)	Peran Bapas Semarang dalam reintegrasi klien pemsyarakatan narkotika; kualitatif deskriptif.	Tahapan reintegrasi berjalan melalui penerimaan, <i>litmas</i> , dan evaluasi, tetapi terdapat beban kerja PK dan persoalan konsistensi klien.	Memberikan konteks empiris mengenai Bapas Semarang dan pentingnya kompetensi PK.
Azkiy (2024)	Strategi mantan narapidana menghadapi stigma; kualitatif.	Dukungan keluarga dan kelompok sosial membantu pemulihan keberfungsian sosial, sedangkan stigma mendorong penarikan diri.	Menguatkan analisis lingkungan sosial inklusif dan stigma.
Tahamata (2021)	Pengawasan klien dan tantangan pelaksanaannya; yuridis empiris kualitatif.	Beban kerja, kompetensi petugas, dan koordinasi menjadi tantangan dalam pengawasan.	Menjadi dasar pembahasan keterbatasan intensitas bimbingan.
Saputra (2021)	Peran PK sebagai motivator, konselor, dan	Komunikasi empatik dan pemahaman psikologis	Mendukung indikator kompetensi komunikasi dan pendampingan PK.

	pengawas; deskriptif kualitatif.	membantu membangun kepercayaan klien.	
--	----------------------------------	---------------------------------------	--

Sumber: Diadaptasi dari Tabel 2.1 skripsi; detail bibliografis perlu dicocokkan kembali dengan sumber penerbit.

Meskipun demikian, kajian yang secara bersamaan menjelaskan hubungan antara kompetensi PK, dukungan lingkungan sosial inklusif, dan pengalaman anak pelaku dalam konteks Bapas Kelas I Semarang masih terbatas. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan melihat reintegrasi sebagai proses yang dibentuk oleh interaksi antara kualitas layanan profesional dan kondisi sosial tempat anak kembali. Rumusan masalah penelitian ini adalah: **bagaimanakah kompetensi PK dan dukungan lingkungan sosial inklusif berperan dalam proses reintegrasi sosial anak pelaku di Bapas Kelas I Semarang?**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kompetensi PK yang relevan dalam pendampingan anak pelaku, mendeskripsikan dukungan dan hambatan lingkungan sosial inklusif, serta menjelaskan keterkaitan keduanya dengan keberhasilan reintegrasi sosial. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bapas dalam

memperkuat kompetensi PK dan membangun jejaring dukungan masyarakat. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Psikologi Pemasyarakatan, khususnya mengenai reintegrasi anak sebagai proses yang bersifat relasional, kontekstual, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal holistik. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus penelitian adalah memahami makna, pengalaman, dan dinamika interaksi yang membentuk reintegrasi sosial anak pelaku dalam konteks nyata Bapas Kelas I Semarang. Desain studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara mendalam tanpa memisahkannya dari lingkungan kelembagaan dan sosial tempat fenomena berlangsung (Yin, 2018).

Sumber data primer terdiri atas tiga kelompok informan, yaitu PK sebagai informan profesional, klien anak sebagai informan pengalaman, dan perwakilan Pokmas Lipas atau masyarakat sebagai informan

lingkungan. Skripsi sumber mencatat komposisi rencana informan sebanyak 10 anak pelaku, 5 PK, dan 5 anggota Pokmas Lipas; namun, artikel ini menyajikan temuan berbasis informan yang telah diwawancarai dan ditulis dalam naskah hasil penelitian, sehingga jumlah informan final perlu disesuaikan

kembali dengan log penelitian dan dokumen persetujuan etik sebelum publikasi. Data sekunder meliputi dokumen *litmas*, laporan perkembangan bimbingan, regulasi, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Tabel 2. Komposisi informan yang direncanakan dalam skripsi

No.	Kelompok informan	Jumlah	Relevansi data
1	Anak pelaku	10 orang	Memberikan pengalaman langsung mengenai bimbingan, kondisi lingkungan sosial, dan proses penyesuaian diri.
2	Pembimbing Kemasyarakatan	5 orang	Menjelaskan pelaksanaan pendampingan, asesmen, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi perkembangan anak.
3	Pokmas Lipas	5 orang	Menjelaskan dukungan masyarakat, partisipasi sosial, pelatihan, dan peluang reintegrasi di lingkungan.

Sumber: Skripsi dan hasil olah peneliti, 2026. Jumlah informan final wajib disesuaikan dengan log wawancara dan dokumen persetujuan penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi partisipatif parsial, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman informan mengenai komunikasi PK, asesmen, bimbingan, dukungan keluarga, stigma, peran masyarakat, dan indikator keberhasilan reintegrasi. Observasi

diarahkan pada interaksi PK dan anak, kondisi lingkungan sosial, serta praktik koordinasi. Studi dokumentasi digunakan untuk memperkuat konteks dan melakukan triangulasi sumber.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Rekaman wawancara ditranskripsikan, kemudian dianalisis melalui *open coding*, pengelompokan kode menjadi subtema, penyajian matriks tematik, dan interpretasi

berdasarkan kerangka Sistem Ekologi Bronfenbrenner. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, pengecekan kembali informasi, dan diskusi dengan pembimbing. Identitas informan anak disamarkan untuk melindungi privasi dan kepentingan terbaik anak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kompetensi PK dalam Pendampingan Anak Pelaku

a. Komunikasi yang berperspektif anak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi merupakan pintu masuk bagi kompetensi PK lainnya. Pada pertemuan awal, anak cenderung memandang PK sebagai bagian dari sistem yang akan memeriksa atau menilai kesalahannya. Persepsi tersebut dapat membuat anak memberikan jawaban singkat, menutup diri, atau menghindari pembicaraan mengenai persoalan yang sensitif. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PK menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menjelaskan peran dan batas kewenangan secara terbuka, serta memulai pembicaraan dari kehidupan anak, seperti sekolah, hobi, kegiatan

sehari-hari, teman, dan rencana masa depan.

Pendekatan tersebut membangun *rapport* dan menciptakan rasa aman. Informan anak menyampaikan bahwa ia lebih nyaman ketika PK berbicara dengan tenang, tidak menggunakan istilah yang sulit, dan mendengarkan sebelum memberikan koreksi. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi berperspektif anak bukan berarti menghilangkan pengawasan, melainkan memadukan empati, batas profesional, dan tanggung jawab. Hubungan yang aman juga memperkaya kualitas asesmen karena anak lebih bersedia menyampaikan kondisi keluarga, pergaulan, sekolah, dan masalah yang dihadapi.

b. Asesmen dan analisis sosial

Kompetensi PK juga terlihat dalam penyusunan *litmas* dan analisis kondisi sosial anak. Informasi dikumpulkan dari anak, orang tua atau wali, sekolah, tokoh masyarakat, dokumen perkara, serta sumber lain yang relevan. Data tersebut tidak berhenti pada pencatatan kronologis, tetapi digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan faktor pelindung. Faktor risiko yang muncul dalam data meliputi pergaulan yang tidak mendukung, konflik keluarga,

putus sekolah, penggunaan zat, serta lemahnya pengawasan. Faktor pelindung meliputi dukungan orang tua, minat positif, keterampilan, hubungan dengan guru, dan kesempatan memperoleh kegiatan produktif.

PK juga menggunakan pendekatan *Risk-Need-Responsivity* (RNR) sebagai salah satu dasar penentuan bentuk intervensi. Namun, hasil instrumen tidak digunakan secara mekanis. Hasil asesmen dikonfirmasi melalui wawancara, observasi, serta informasi keluarga. Pendekatan ini penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan; perilaku dan kebutuhannya dapat berubah seiring perubahan lingkungan, hubungan keluarga, dan pengalaman pendampingan. Dengan demikian, kompetensi PK terletak pada kemampuan menerjemahkan data menjadi rencana bimbingan yang individual dan realistis.

c. Pemahaman perkembangan psikologis dan trauma anak

Data penelitian memperlihatkan bahwa anak dapat menunjukkan respons yang beragam ketika menghadapi proses hukum dan reintegrasi, seperti takut, marah, diam, menyangkal, atau sulit mempercayai

orang dewasa. PK perlu memahami respons tersebut agar tidak segera menafsirkannya sebagai ketidakpatuhan atau sikap menantang. Kesabaran, pengelolaan emosi, wawancara anak, konseling dasar, penanganan trauma, komunikasi keluarga, pencegahan penggunaan zat, dan mediasi konflik menjadi kompetensi yang dipandang perlu diperkuat.

Perspektif perkembangan menuntut agar anak tidak diperlakukan sepenuhnya seperti klien dewasa. Cara memberikan koreksi, menetapkan tanggung jawab, menyampaikan konsekuensi, dan memantau kepatuhan perlu disesuaikan dengan kapasitas pemahaman anak. Temuan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang menempatkan perlindungan dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap intervensi.

d. Kemampuan membangun jejaring dan koordinasi

Reintegrasi tidak dapat dilaksanakan oleh PK seorang diri. PK menghubungkan anak dengan keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, Pokmas Lipas, masyarakat, tempat kerja, dan layanan profesional. Dalam salah satu pengalaman yang dicatat,

anak yang mengalami kesulitan kembali ke sekolah didukung melalui koordinasi antara keluarga, sekolah, dan PK. Sekolah menunjuk guru pendamping, sementara keluarga membantu mengatur kehadiran secara bertahap.

Temuan ini menempatkan PK sebagai penghubung antarsistem. Kompetensi jejaring tidak sekadar berupa kemampuan menyampaikan rujukan, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan anak dipahami oleh pihak penerima dukungan. Semakin kompleks kondisi anak, semakin penting pembagian peran dan komunikasi lintas sektor. Oleh karena itu, keberhasilan reintegrasi perlu didukung mekanisme koordinasi yang terjadwal dan terdokumentasi.

e. Evaluasi perkembangan secara multidimensional

Evaluasi perkembangan anak tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya tindak pidana baru. PK

memperhatikan kehadiran dan partisipasi dalam bimbingan, kepatuhan terhadap kesepakatan, perubahan pergaulan, hubungan keluarga, pendidikan atau pekerjaan, serta kemampuan mengelola masalah. Perubahan kecil seperti keberanian meminta bantuan, kembali belajar, mengurangi konflik, dan memiliki rutinitas yang lebih teratur dipandang sebagai indikator proses yang penting.

Dengan demikian, keberhasilan reintegrasi bersifat multidimensional. Tidak mengulangi tindak pidana merupakan indikator penting, tetapi belum cukup menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Anak yang tidak melakukan tindak pidana ulang tetapi tetap terisolasi, tidak memiliki aktivitas produktif, dan tidak memperoleh dukungan sosial belum tentu mengalami reintegrasi yang kuat.

Tabel 3. Matriks kompetensi PK dan temuan penelitian

Aspek kompetensi PK	Temuan utama	Informan pendukung
Pendampingan dan pengawasan	PK melakukan bimbingan, kunjungan, pemantauan, dan penguatan terhadap anak.	Ibu Rina; Dimas
Asesmen dan <i>litmas</i>	Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan dianalisis untuk menemukan faktor risiko serta faktor pelindung.	Ibu Rina
Pendekatan RNR	Bentuk intervensi disesuaikan dengan risiko, kebutuhan, dan responsivitas, lalu divalidasi melalui wawancara serta observasi.	Ibu Rina
Komunikasi	PK menggunakan bahasa sederhana, mendengarkan tanpa menghakimi, menajaga	Ibu Rina; Dimas

	konsistensi, dan membangun kepercayaan.	
Jejaring dan koordinasi	PK berkoordinasi dengan keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, Pokmas, dan layanan profesional.	Ibu Rina; Dimas; Pak Hadi
Evaluasi	Perkembangan dinilai melalui perubahan perilaku, relasi keluarga, pendidikan atau pekerjaan, dan kemampuan mengelola masalah.	Ibu Rina; Dimas
Beban kerja	Rasio PK dan klien dapat membatasi intensitas bimbingan dan kunjungan.	Ibu Rina; Dimas

Sumber: Hasil olah data wawancara peneliti dalam skripsi, 2026.

2. Dukungan Lingkungan Sosial Inklusif

a. Keluarga sebagai lingkungan terdekat

Keluarga menjadi lingkungan sosial yang paling dekat dengan anak. Dukungan keluarga tampak melalui pengingat jadwal, pendampingan kegiatan, bantuan mencari aktivitas positif, kesediaan mendengarkan, dan pemberian kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Salah satu informan anak menggambarkan bahwa kesempatan untuk belajar memperbaiki sepeda motor membuatnya merasa masih dipercaya dan memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan.

Namun, keluarga juga dapat menjadi sumber tekanan apabila pengawasan berubah menjadi kontrol berlebihan atau kesalahan masa lalu terus diungkit.

Penerimaan secara fisik tidak selalu berarti penerimaan secara emosional. Karena itu, dukungan keluarga perlu menggabungkan pengawasan, komunikasi terbuka, batas yang sehat, dan penghargaan terhadap proses perubahan anak.

b. Stigma masyarakat sebagai hambatan

Stigma merupakan hambatan utama dalam reintegrasi. Stigma dapat berbentuk anggapan bahwa anak tidak dapat dipercaya, pasti mengulangi perbuatannya, atau akan memberikan pengaruh buruk kepada anak lain. Stigma tidak selalu muncul melalui penolakan terbuka. Anak dapat dijauhi, tidak diajak mengikuti kegiatan, dicurigai ketika terjadi masalah, diberi julukan, atau tidak memperoleh kesempatan dalam pendidikan dan pekerjaan.

Pengalaman informan anak menunjukkan bahwa ejekan dan

pembatasan partisipasi dapat menimbulkan dorongan untuk membalas. Bimbingan PK membantu anak mengelola respons tersebut dengan tidak langsung bereaksi dan mencari orang dewasa yang dipercaya. Temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan perilaku anak membutuhkan lingkungan yang memberi kesempatan untuk mempraktikkan perubahan. Jika anak terus ditempatkan dalam identitas masa lalu, proses reintegrasi menjadi lebih sulit.

c. Peran Pokmas Lipas dan partisipasi masyarakat

Pokmas Lipas berpotensi menjadi jembatan antara Bapas dan masyarakat. Kegiatan yang dapat dikembangkan meliputi pelatihan keterampilan, olahraga, kegiatan sosial dan keagamaan, pendampingan usaha

kecil, serta penghubung dengan peluang kerja. Keunggulan Pokmas terletak pada kedekatannya dengan lingkungan setempat sehingga dapat membantu menerjemahkan kebutuhan anak ke dalam kesempatan yang nyata.

Keterlibatan masyarakat masih menghadapi persoalan kesinambungan. Partisipasi dapat berlangsung secara situasional dan belum selalu didukung jadwal, pembagian peran, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas. Oleh sebab itu, penguatan Pokmas Lipas perlu dilakukan melalui pemetaan potensi masyarakat, peningkatan kapasitas anggota, komunikasi terstruktur dengan PK, dan evaluasi kegiatan secara berkala.

Tabel 4. Bentuk dukungan dan hambatan lingkungan sosial inklusif

Unsur lingkungan	Temuan penelitian	Informan pendukung
Keluarga	Memberikan dukungan, membangun rutinitas, menetapkan batas yang jelas, dan berkomunikasi dengan anak; hambatannya berupa kontrol berlebihan dan konflik lama.	Ibu Rina; Dimas
Masyarakat	Penerimaan belum merata; masih terdapat kekhawatiran, gosip, kecurigaan, dan stigma terhadap anak.	Dimas; Pak Hadi; Ibu Rina
Pokmas Lipas	Menjadi penghubung Bapas dan masyarakat melalui kegiatan keterampilan, sosial, olahraga, serta dukungan ekonomi.	Ibu Rina; Pak Hadi
Pendidikan	Koordinasi dengan sekolah dan guru pendamping dapat membantu anak kembali mengikuti kegiatan pendidikan secara bertahap.	Ibu Rina; Dimas
Ekonomi dan keterampilan	Kesempatan belajar, magang, bekerja, atau mengembangkan	Dimas; Pak Hadi

	keterampilan membantu membangun rasa percaya diri dan rutinitas produktif.	
--	--	--

Sumber: Hasil olah data wawancara peneliti dalam skripsi, 2026.

3. Sinergi Kompetensi PK dan Lingkungan Sosial dalam Reintegrasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi PK dan lingkungan sosial inklusif tidak bekerja sebagai dua unsur yang terpisah. Kompetensi PK membuka akses, menyusun asesmen, memberikan bimbingan, dan mengoordinasikan dukungan. Lingkungan keluarga, sekolah, Pokmas, dan masyarakat menyediakan ruang sosial bagi anak untuk menjalankan perubahan. PK dapat merancang intervensi yang baik, tetapi dampaknya terbatas apabila anak tidak memperoleh kesempatan untuk belajar, beraktivitas, berinteraksi, dan membangun kepercayaan kembali.

Dalam perspektif Sistem Ekologi Bronfenbrenner, hubungan anak dengan PK, keluarga, dan teman sebaya berlangsung pada tingkat mikrosistem. Koordinasi antara Bapas, keluarga, sekolah, dan Pokmas mencerminkan mesosistem. Stigma, norma sosial, dan kebijakan yang memengaruhi penerimaan masyarakat

berada pada lingkungan yang lebih luas. Perubahan pada satu sistem dapat memperkuat atau melemahkan sistem lainnya.

Keberhasilan reintegrasi dalam penelitian ini tampak melalui lima indikator yang saling berhubungan: perubahan perilaku dan pengendalian diri; penerimaan serta dukungan keluarga; keterlibatan dalam pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan; relasi sosial yang sehat; dan tujuan hidup yang realistis. Indikator tersebut menunjukkan bahwa reintegrasi merupakan proses berkelanjutan, bukan peristiwa sesaat setelah anak kembali ke rumah.

Hambatan utama terletak pada stigma, konflik keluarga, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan rasio PK-klien yang membatasi intensitas bimbingan. Dalam kondisi beban kerja tinggi, PK perlu menyusun prioritas berdasarkan risiko dan kebutuhan, menggunakan jadwal terstruktur, memanfaatkan komunikasi jarak jauh secara proporsional, serta melibatkan keluarga dan Pokmas. Namun, dukungan personel dan kebijakan kelembagaan tetap diperlukan agar

kualitas layanan tidak sepenuhnya bergantung pada upaya individual PK.

Tabel 5. Sintesis hasil penelitian berdasarkan posisi informan

Informan	Fokus temuan	Interpretasi analitis
Ibu Rina, PK	Kompetensi PK dan sistem pendukung.	PK berperan sebagai pendamping, asesor, komunikator, koordinator, evaluator, serta penghubung anak dengan lingkungan.
Dimas, klien anak	Pengalaman menjalani reintegrasi.	Kualitas komunikasi PK dan dukungan keluarga atau masyarakat memengaruhi kemampuan anak menjalani transisi serta menyusun rencana masa depan.
Pak Hadi, perwakilan masyarakat/Pokmas	Lingkungan sosial dan partisipasi masyarakat.	Penerimaan masyarakat tersedia, tetapi belum merata; stigma, kekhawatiran, dan kurangnya informasi masih menjadi hambatan.

Sumber: Hasil analisis data primer dalam skripsi, 2026.

Tabel 6. Indikator keberhasilan reintegrasi sosial anak pelaku

No.	Indikator	Bentuk perubahan atau bukti proses
1	Perubahan perilaku dan pengendalian diri	Mempertimbangkan konsekuensi, mengurangi pergaulan berisiko, mengelola konflik, dan mencari bantuan.
2	Penerimaan serta dukungan keluarga	Adanya komunikasi, pengingat jadwal, pendampingan kegiatan, batas yang sehat, dan pemberian kesempatan.
3	Pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan	Keterlibatan dalam aktivitas produktif yang memberikan struktur, keterampilan, dan tujuan.
4	Relasi sosial yang sehat	Memilih pergaulan, mempertahankan hubungan dengan orang dewasa yang dipercaya, dan menghindari respons kekerasan.
5	Tujuan hidup yang realistis	Rencana melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, bekerja, mengembangkan keterampilan, atau membantu keluarga.
6	Tidak terjadi pengulangan tindak pidana	Tidak melakukan pelanggaran baru, tetapi indikator ini harus dibaca bersama indikator reintegrasi lainnya.

Sumber: Sintesis hasil wawancara dan analisis peneliti, 2026.

D. Kesimpulan

Kompetensi PK dalam proses reintegrasi sosial anak pelaku bersifat multidimensional. Kompetensi tersebut

mencakup komunikasi yang berperspektif anak, asesmen dan analisis sosial, pemahaman perkembangan psikologis dan trauma, penyusunan bimbingan individual, kemampuan membangun jejaring, koordinasi lintas pihak, serta evaluasi perkembangan secara multidimensional. Kompetensi tersebut memungkinkan PK menyesuaikan pendampingan dengan faktor risiko, faktor pelindung, kebutuhan perkembangan, dan kondisi sosial setiap anak.

Dukungan lingkungan sosial inklusif berperan dalam menjaga keberlanjutan perubahan anak. Dukungan tersebut tidak hanya berupa penerimaan, tetapi juga diwujudkan melalui komunikasi keluarga yang sehat, kesempatan mengikuti pendidikan atau pelatihan, akses kegiatan produktif, partisipasi sosial, serta keterlibatan Pokmas Lipas. Sebaliknya, stigma, konflik keluarga, pergaulan berisiko, keterbatasan ekonomi, dan keterbatasan layanan lanjutan menjadi hambatan yang dapat melemahkan proses reintegrasi.

Reintegrasi sosial anak pelaku terbentuk melalui keterhubungan antara kompetensi PK dan lingkungan yang

mendukung. PK menyediakan asesmen, komunikasi, bimbingan, koordinasi, dan evaluasi; keluarga, sekolah, Pokmas, dan masyarakat menyediakan penerimaan serta kesempatan nyata bagi anak untuk mempertahankan perubahan. Oleh karena itu, keberhasilan reintegrasi tidak cukup diukur dari tidak terulangnya tindak pidana, tetapi juga dari perubahan perilaku, hubungan keluarga yang membaik, akses pendidikan atau pekerjaan, relasi sosial yang sehat, penerimaan sosial, dan tujuan hidup yang realistis.

Bapas perlu memperkuat pelatihan PK dalam komunikasi berperspektif anak, asesmen sosial, perkembangan psikologis dan trauma, konseling dasar, komunikasi keluarga, mediasi konflik, serta pengelolaan jejaring. Keluarga dan Pokmas perlu diberi penguatan mengenai dukungan yang tidak menghakimi dan pemberian kesempatan nyata. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan informan yang lebih beragam dan desain longitudinal untuk mengikuti perkembangan reintegrasi anak dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiy, E. P. (2024). Mantan narapidana dalam menghadapi stigma negatif masyarakat. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 1–15. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3373>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Saputra, N. E. (2021). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien pemasarakatan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2345–2358. <https://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5298>
- Sasmita, W. N., Kriswanto, H. D., & Jhody, P. S. (2024). Peran Bapas Semarang dalam reintegrasi sosial masyarakat klien pemasarakatan narkoba. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5), 1618–1629. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2327>
- Sugiyono. (2022). [Identitas edisi dan penerbit perlu diverifikasi].
- Tahamata, Y. M. (2021). Pengawasan kepada klien pemasarakatan: Tantangan dan alternatif penyelesaian. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 73–82. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/3586>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.